

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tirta Sari (SAK ETAP Implementation In The Financial Statements On Cooperative Tirta Sari)

Anggun Sabella

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: anggun.2310@yahoo.com

Abstrak

SAK ETAP merupakan solusi dari masalah yang kerap menerpa koperasi, yaitu masalah pengelolaan keuangan. Sebagai standar yang ditujukan untuk memudahkan koperasi dalam membuat laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipahami oleh pihak eksternal perusahaan, SAK ETAP seharusnya sudah banyak diketahui atau bahkan diterapkan oleh koperasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan KSP Tirta Sari di Kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 2 orang yang terdiri dari ketua dan kasir KSP Tirta Sari yang menjadi obyek penelitian. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaporan keuangan pada KSP Tirta Sari tersebut sebesar 76% telah sesuai dengan SAK ETAP dan sisanya sebesar 24% belum sesuai dengan SAK ETAP karena belum dibuatnya catatan atas laporan keuangan. SAK ETAP ternyata masih belum benar-benar dikuasai oleh para pelaku koperasi. Salah satu hal yang mempengaruhi adalah karena latar belakang pendidikan, selain itu disebabkan pula oleh sosialisasi atau pun pelatihan dari pihak pemerintah maupun lembaga yang membawahi koperasi masih kurang maksimal, sehingga pemahaman akan pentingnya SAK ETAP masih kurang dipahami pelaku koperasi. Untuk para pelaku koperasi diharapkan di masa yang akan datang akan menerapkan laporan keuangan lengkap berdasarkan SAK ETAP.

Kata kunci: SAK ETAP, koperasi, laporan keuangan.

Abstract

SAK ETAP is a problem solution that usually occurs in economic enterprise (cooperation), called financial management issues. As a standard that is intended to facilitate the cooperation in financial report which is accountable and can be understood by external companies, SAK ETAP should have known or even applied by cooperatives. The purpose of this study is to investigate the application of SAK ETAP in the financial report KSP ETAP Tirta Sari in Banyuwangi. This research applies qualitative research and descriptive approach. Sources of the data is obtained from interviews and documentary. The informant in this study were two people consist of the chairman and the cashier of KSP Tirta Sari. The survey reveals that the financial report on the KSP Tirta Sari is 76 % equals with SAK ETAP and the rest 24% is not equals with SAK ETAP, because the financial report is not made yet. SAK ETAP has not yet been completely understood by the cooperative worker. One of the reason is because the educational background. Besides, it also because if the socialization and the training from the government is not maximum. So, the cooperative worker cannot fully understand what SAK ETAP means and how to apply in their daily work. It expected for the cooperative worker to apply the fully financial report based on SAK ETAP.

Keywords : SAK ETAP, SMEs, financial report

Pendahuluan

Bagi perekonomian Indonesia, koperasi merupakan bentuk gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dan sebagai salah satu penopang perekonomian negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kehadiran koperasi diharapkan mampu mendorong potensi masyarakat untuk terus

mengembangkan sektor produktifnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat (Prasetyawan, 2015:1). Selain itu, koperasi juga berperan sebagai salah satu fasilitator dan juga pendamping bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha-usahanya, misalnya melalui bantuan modal, manajemen, pemasaran, dan bantuan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, koperasi

adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Kerbatasan informasi akuntansi dan kelemahan pada pelaporan keuangan yang tidak terstruktur dengan baik dan tidak berstandar berakibat pada sulitnya koperasi-koperasi di Indonesia memperoleh bantuan dana atau permodalan dari pemerintah, mitra kerja ataupun perbankan. Kondisi tersebut tentunya akan mempersulit koperasi untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Alasan utama sulitnya pemerintah memberikan bantuan kepada koperasi adalah karena sulitnya mencari data formal seperti laporan keuangan dan rencana bisnis yang belum jelas. Oleh sebab itu, para pelaku koperasi secara tidak langsung dituntut untuk melakukan pelaporan keuangan yang formal dan terstruktur sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku agar dapat dipahami tidak hanya oleh pemilik tetapi juga oleh pihak lain, seperti pemerintah ataupun perbankan yang akan memberikan permodalan (Azaria, dalam Hertiyo 2015:2).

Sejak 1 Januari 2012 standar akuntansi keuangan koperasi menggunakan kebijakan akuntansi yang baru dan sebagai langkah transisional disahkan dengan surat edaran Deputi Bidang Kelembagaan KUKM Nomor 200/SE/Dep.I/XII/2012. Proses penyesuaiannya dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai institusi pembina melalui penerbitan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 4/Per/M.KUKM/VII/2012 pada 25 Juli 2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi (Heriyanto, 2012).

Berdasarkan SAK ETAP, laporan keuangan lengkap meliputi: (a) neraca, (b) laporan laba rugi, (c) laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan: (i) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau (ii) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, (d) laporan arus kas, (e) catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelas lainnya. Laporan keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus menyajikan minimum dua periode dari setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait (IAI, 2013:12-13).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mengacu pada *The International Financial Reporting Standard for Small and Medium-Sized Entitas (IFRS for SMEs)*. Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikankemudahan dalam penyusunan laporan keuangan dan dapat memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya sehingga pelaku koperasi dan pengusaha UKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak dan manfaat lainnya serta membantu pengurus dalam menyusun laporan pertanggungjawaban

keuangan koperasi pada rapat anggota tahunan, maupun untuk tujuan-tujuan lain. SAK ETAP digunakan bagi perusahaan dengan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit (IAI, 2013:1). Diharapkan dengan adanya SAK ETAP akan menjawab kesulitan para pelaku koperasi dan UKM dalam menyusun laporan keuangan agar menjadi suatu pelaporan keuangan yang efektif namun juga tidak serumit SAK Umum, sehingga mempermudah manajemen dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan strategi ke depannya.

Komitmen nyata bidang pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dicanangkan Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Banyuwangi, tahun 2013 – 2014 mendapat apresiasi dari Presiden dan Menteri Koperasi dan UMKM RI. Banyuwangi dinilai berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui koperasi aktif dan sehat. Untuk koperasi aktif dan sehat Banyuwangi ada 732 lembaga dari 866 lembaga koperasi yang ada, sedangkan sisanya berjumlah 134 lembaga merupakan koperasi yang tidak aktif. Dari ratusan jumlah koperasi yang ada di Banyuwangi termasuk diantaranya adalah koperasi simpan pinjam. Beberapa daftar nama koperasi simpan pinjam (KSP) yang ada di kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Daftar Nama dan Tahun Pendirian KSP kabupaten Banyuwangi

Nama KSP	Tahun Pendirian
KSP Tirta Sari	1983
KSP Milan	1999
KSP Jamu	2000
KSP Jaya Artha	2000
KSP Arum	2001
KSP Tiara	2002
KSP Agus	2003
KSP Mitra Usaha	2003
KSP Rizki Sakinah	2004
KSP Artha Makmur	2004

Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Banyuwangi tahun 2016

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara kepada bagian keuangan KSP Tirta Sari diketahui bahwa koperasi ini telah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan

penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan. Dari sosialisasi tersebut koperasi menyusun laporan keuangannya untuk periode 2015 menyesuaikan dengan SAK ETAP, namun penerapannya belum sepenuhnya dilakukan.

Karena di KSP tersebut baru menerapkan SAK ETAP di tahun 2015, maka peneliti tertarik untuk menjadikan KSP Tirta Sari sebagai objek penelitian. Dari penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti juga dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan di KSP tersebut tergolong bagus. Hal ini terlihat dari sisa hasil usaha (SHU) pada KSP Tirta Sari yang selalu meningkat setiap tahunnya. Sebagian besar SHU berasal dari pendapatan pada KSP Tirta Sari tersebut. Selain itu, KSP Tirta Sari ini termasuk salah satu koperasi tertua yang ada di kabupaten Banyuwangi, yang masih mampu mempertahankan eksistensinya hingga saat ini dibandingkan dengan koperasi-koperasi baru yang hanya bertahan antara 2-5 tahun saja meskipun memiliki SDM yang lebih maju.

Laporan keuangan yang disusun oleh KSP Tirta Sari selama ini telah dilaporkan dan diperiksa oleh Dinas Koperasi kabupaten Banyuwangi. Namun, belum pernah diaudit oleh KAP maupun auditor independen karena menurut pihak koperasi dengan melaporkan laporan keuangan setiap bulan dan laporan tahunan pada saat rapat anggota tahunan ke Dinas Koperasi itu sudah cukup. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai audit atas laporan keuangan yang telah disusun KSP Tirta Sari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tirta Sari”.

Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang ingin penulis ungkapkan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan koperasi simpan pinjam (KSP) Tirta Sari.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor, dalam Moleong, 2012:3). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data, menganalisis data, dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada analisis tersebut.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan Supomo, 2014:146). sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media (Indriantoro dan Supomo, 2014:147).

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti survei, observasi, dan dokumentasi (Sanusi, 2014:105). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survei dengan cara menggunakan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2014:152). Sedangkan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2014:114).

Lokasi Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah KSP Tirta Sari yang beralamat di Jalan Kembangiryan nomor 20 kecamatan Genteng, kabupaten Banyuwangi.

Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Moleong, 2012:330).

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber dan metode. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, dalam Moleong, 2012:330). Sedangkan triangulasi dengan metode dilakukan dengan dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama (Patton, dalam Moleong, 2012:331).

Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen, dalam Moleong, 2012:248). Menurut Miles dan Huberman (dalam Moleong, 2012:367) tahapan-tahapan analisis data kualitatif antara lain sebagai berikut:

1. Reduksi Data, peneliti akan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data, peneliti menyajikan data pada umumnya berupa teks naratif agar memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. Penarikan kesimpulan, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam tahap ini. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara lengkap akan dibuat dasar dalam perumusan kesimpulan oleh peneliti.

Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah merupakan uraian singkat mengenai langkah kerja yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kerangka pemecahan tersebut terdiri atas start, identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, hasil, kesimpulan, dan finish.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

KSP Tirta Sari merupakan salah satu dari beberapa koperasi tua di kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Koperasi ini berdiri pada tahun 1983, dengan nomor badan hukum 5406/BH/II/83 tanggal 25 Juni 1986 dan bertempat di jalan Kembiratan no.20 kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi, yang mana pendirian koperasi ini pada awalnya didirikan oleh para anggota koperasi itu sendiri.

Koperasi ini bergerak di bidang usaha simpan pinjam yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan koperasi maupun simpanan berjangka dari anggota koperasi dan menyalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk dana pinjaman. Sampai saat ini anggota dari KSP Tirta Sari sebanyak 525 orang dan calon anggota sebanyak 305 orang.

Struktur Organisasi

Pada KSP Tirta Sari terdapat struktur organisasi yang diketuai oleh Hery Satimun, H. Sukarno B.D sebagai sekretaris dan Budi Nuratim sebagai bendahara. Selain pengurus dalam organisasi KSP "Tirta Sari" terdapat pengawas, pengawas merupakan bagian penting dalam koperasi karena pengawas berkedudukan lebih tinggi dari pada pengurus. Pengawas diketuai oleh Slamet serta Masrip dan Sukarji sebagai anggota.

Standar Akuntansi untuk KSP Tirta Sari

Laporan keuangan adalah laporan hasil akhir dari kegiatan usaha dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan dibuat bertujuan untuk mengetahui keadaan keuangan dan kondisi perusahaan serta sebagai dasar untuk menentukan kebijakan-kebijakan di tahun mendatang. KSP Tirta Sari yang berdiri pada tahun 1983 menjalankan kegiatan intermediasi dana dengan mengumpulkan dana dari seluruh anggota koperasi dalam bentuk tabungan maupun simpanan berjangka untuk kembali didistribusikan kepada anggota yang membutuhkan dana pinjaman. Berdasarkan hal ini terlihat jelas bahwa KSP

Tirta Sari tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan karena belum mendaftarkan diri sebagai perusahaan publik, sehingga KSP Tirta Sari hanya bertanggung jawab atas dana anggota-anggotanya.

SAK ETAP paragraf 3.12 dan 3.9 menyatakan bahwa laporan keuangan entitas meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya. KSP Tirta Sari telah menerapkan pengungkapan secara komparatif dengan periode sebelumnya, yaitu 2015 dan 2014.

Kemudian berkaitan dengan penerapan SAK ETAP secara penuh, SAK ETAP dalam paragraf 3.3 menyebutkan bahwa laporan keuangan menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas secara wajar dan harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Namun, dalam penerapannya KSP Tirta Sari belum membuat catatan atas laporan keuangan (CALK) sehingga laporan yang dihasilkan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

Definisi Pos-pos dalam Laporan Keuangan KSP Tirta Sari

1. Aset

Aset adalah sumber ekonomis dari suatu usaha yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi usaha tersebut di masa yang akan datang. KSP Tirta Sari membedakan pencatatan aset dalam beberapa hal, yaitu :

a. Aset Lancar

- Kas dan setara kas. Kas adalah harta berupa uang tunai yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha. Sedangkan setara kas yang dimiliki KSP Tirta Sari berupa tabungan pada bank.
- Piutang. Koperasi mencatat piutang anggota dan piutang non anggota secara terpisah. Piutang anggota yang dimaksud merupakan tagihan koperasi sebagai akibat transaksi pemberian pinjaman kepada anggota. Sedangkan piutang non anggota merupakan tagihan koperasi sebagai akibat transaksi pemberian pinjaman kepada non anggota.
- Penyisihan Penghapusan Pinjaman merupakan penyisihan nilai tertentu, sebagai "pengurang nilai nominal" piutang anggota dan non anggota atas terjadinya kemungkinan risiko piutang tak tertagih, yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian akibat pemberian piutang pinjaman kepada anggota dan non anggota.
- Beban Dibayar Di Muka dalam KSP Tirta Sari ini merupakan beban yang dibayarkan untuk membayar sewa gedung (kantor) untuk menjalankan usahanya.

b. Aset Tidak Lancar

- Aset tetap, berupa kendaraan pengurus, kendaraan operasional dan peralatan kantor karena koperasi tersebut melakukan sewa gedung untuk menjalankan kegiatan usahanya.
- Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan hasil penurunan dari nilai aset tetap. Akumulasi penyusutan aset tetap yang ada dalam neraca merupakan akumulasi untuk kendaraan pengurus, kendaraan operasional, dan peralatan kantor yang dicatat dalam satu pos.

2. Kewajiban

Kewajiban merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh koperasi di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aset atau pemberian jasa, yang disebabkan oleh transaksi pada masa sebelumnya. Pos-pos kewajiban yang ada pada KSP Tirta Sari antara lain:

- a. Simpanan Sukarela merupakan sejumlah simpanan dari anggota yang tidak menentukan kepemilikan dan dapat diambil sewaktu-waktu.
- b. Simpanan Berjangka merupakan simpanan yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
- c. Pinjaman Bank dan Pinjaman Koperasi merupakan pinjaman yang dilakukan KSP Tirta Sari yang digunakan untuk memenuhi modal kerja dan transaksi bisnis koperasi.
- d. Kewajiban Lain-lain untuk dana pendidikan karyawan/anggota, dana pengurus, dana manajemen karyawan, dan dana sosial.

3. Ekuitas

Ekuitas dalam koperasi merupakan modal yang dimiliki koperasi untuk menjalankan usahanya. Pos-pos ekuitas yang ada di KSP Tirta Sari diantaranya :

- a. Simpanan Pokok merupakan sejumlah uang yang sama besarnya, yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.
- b. Simpanan Wajib merupakan sejumlah uang yang tidak sama besarnya, yang wajib dibayarkan kepada koperasi selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- c. Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada koperasi yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
- d. Cadangan Umum ialah bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang disisihkan sesuai dengan anggaran dasar atau ketepatan rapat anggota.
- e. Cadangan Risiko ialah dana yang disisihkan koperasi untuk menutupi piutang tak tertagih.

- f. Modal Donasi adalah modal yang diterima koperasi dari pihak lain secara sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha.
- g. SHU Belum Dibagi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu periode akuntansi dikurangi dengan biaya operasional, penyusutan dan biaya-biaya lain, termasuk pajak dalam satu periode akuntansi bersangkutan.

4. Penghasilan

Penghasilan dicatat oleh koperasi dalam pos pendapatan operasional. Koperasi mengklasifikasikan pendapatan operasional dalam beberapa pos yaitu pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan, pendapatan administrasi atas pinjaman yang diberikan, denda pinjaman

5. Beban

Koperasi mengklasifikasikan beban menjadi beban operasional dan beban non operasional. Beban operasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional koperasi. Klasifikasi beban operasional pada KSP Tirta Sari antara lain beban bunga simpanan atas tabungan dan simpanan, beban bunga pinjaman koperasi dan bank, beban umum dan administrasi, beban operasional lainnya. Sedangkan klasifikasi beban non operasional diantaranya adalah beban penyertaan dan beban non operasional lainnya

Pengakuan dan Pengukuran Pos-pos dalam Laporan Keuangan KSP Tirta Sari

1. Aset

Aset Lancar

- a. Kas dan setara kas dalam neraca KSP Tirta Sari diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Pengakuan dan pengukuran kas tersebut telah sesuai dengan SAK ETAP tahun 2013.
- b. Piutang anggota dan non anggota diakui saat terjadinya transaksi pinjaman oleh anggota/non anggota dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila ada kemungkinan tidak dapat dilunasi maka koperasi membuat akun penyisihan penghapusan pinjaman. Pengakuan dan pengukuran piutang pada KSP Tirta Sari tersebut telah sesuai dengan SAK ETAP tahun 2013.
- c. Penyisihan penghapusan pinjaman dibentuk sebagai akibat pemberian piutang kepada anggota dan non anggota, yang nilainya disesuaikan dengan perkiraan piutang tak tertagih setiap periodenya dan diakui sebagai aset. Pengakuan dan pengukuran pos penyisihan penghapusan pinjaman dalam KSP Tirta Sari sudah sesuai dengan SAK ETAP tahun 2013.
- d. Beban dibayar di muka atas sewa gedung (kantor) pada koperasi ini diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Pengakuan dan pengukuran beban di

bayar di muka pada KSP Tirta Sari tersebut sudah sesuai dengan SAK ETAP tahun 2013.

Aset Tidak Lancar

a. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki KSP Tirta Sari meliputi kendaraan pengurus, kendaraan operasional, dan peralatan kantor yang dicatat dalam satu pos yaitu aset tetap dan dicatat sebesar biaya perolehannya ditambah biaya-biaya yang digunakan sampai aset tersebut siap digunakan. Koperasi seharusnya tidak menggunakan satu pos saja untuk aset tetap tetapi memisahkan pos aset tetap. Sehingga dapat diketahui secara rinci aset tetap yang dimiliki oleh KSP Tirta Sari. Pengakuan dan pengukuran aset tetap pada KSP Tirta Sari telah sesuai dengan SAK ETAP tahun 2013.

b. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan jumlah dari penyusutan seluruh aset tetap yaitu kendaraan operasional, kendaraan inventaris dan peralatan kantor. KSP Tirta Sari menggunakan metode garis lurus tanpa sisa untuk menyusutan aset tetap yang dimilikinya. Sedangkan umur manfaat untuk aset tetap yang dimiliki koperasi tersebut masing-masing ialah 4 tahun. Saldo dari penyusutan tersebut disajikan sebagai pengurang aktiva dan penyusutan diakui sebagai beban.

Pengakuan dan pengukuran penyusutan aset tetap pada KSP Tirta Sari telah sesuai dengan SAK ETAP. Namun, seharusnya koperasi memisahkan pos akumulasi penyusutan aset tetap untuk masing-masing pos aset tetap. Dengan memisahkan pos akumulasi untuk penyusutan aset tetap, maka akan diketahui nilai buku untuk masing-masing aset tetap dalam tahun berjalan.

2. Kewajiban

Pos-pos kewajiban yang ada pada KSP Tirta Sari yaitu simpanan sukarela, simpanan berjangka, pinjaman bank, pinjaman koperasi dan kewajiban lain-lain diakui sebagai kewajiban dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Pengakuan dan pengukuran pos-pos kewajiban di KSP Tirta Sari telah sesuai dengan SAK ETAP tahun 2013.

3. Ekuitas

Pos-pos dalam ekuitas yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan, cadangan umum, cadangan risiko, modal donasi, dan SHU belum dibagi diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Pengakuan dan pengukuran simpanan pokok pada KSP Tirta Sari tersebut sudah sesuai dengan SAK ETAP tahun 2013.

4. Penghasilan

KSP Tirta Sari telah mengakui pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan diukur sesuai dengan nilai nominalnya. Penghasilan yang diperoleh koperasi berasal dari unit usaha simpan pinjam. Untuk penghasilan lain di luar unit usaha koperasi diklasifikasikan dalam pendapatan

non operasional. Pengakuan dan pengukuran pendapatan pada KSP Tirta Sari telah sesuai dengan SAK ETAP tahun 2013.

5. Beban

Pada KSP Tirta Sari, beban-beban yang ada diakui pada saat terjadinya transaksi dan dicatat sebesar nilai nominal. Pencatatan beban kerugian piutang pada koperasi dengan menggunakan metode tidak langsung sehingga dibentuk cadangan atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

Pengakuan dan pengukuran beban operasional dan non operasional yang diterapkan oleh KSP Tirta Sari sudah sesuai dengan SAK ETAP. Beban bunga simpanan dan beban bunga pinjaman diakui sesuai dengan periode waktu jatuh temponya. Beban operasional lainnya pada KSP Tirta Sari diakui pada saat terjadinya, diukur sebesar jumlah yang harus diselesaikan koperasi.

Beban pajak penghasilan pada KSP Tirta Sari dinilai sebesar Rp. 4.092.940 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota Orang Pribadi pasal 2 yaitu sebesar 10% dari jumlah penghasilannya.

Sedangkan sesuai Pph final pasal 4 ayat (2) seharusnya koperasi membayar pajak atas sewa gedungnya, yaitu sebesar 10% dari nilai sewa yang dinilai sebesar Rp. 3.750.000. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 227/PJ/2002 tanggal 23 April 2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran serta Pelaporan PPh dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Namun, dalam penerapannya KSP Tirta Sari belum melakukan pembayaran pajak atas sewa gedungnya.

Penyajian dan Pengungkapan

1. Neraca

KSP Tirta Sari menyajikan aset di dalam neraca berdasarkan likuiditas pos aset, yaitu aset lancar dan aset tetap. Hal ini dirasa lebih informatif bagi pengguna laporan keuangan. Pos-pos yang disajikan oleh KSP Tirta Sari antara lain adalah kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, aset tetap, utang usaha dan utang lainnya, kewajiban diestimasi, dan ekuitas. Tidak adanya pos persediaan karena koperasi ini bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan tidak ada pos properti investasi karena semua properti milik koperasi dan tidak ada yang merupakan hak dari *lesse*, serta tidak adanya aset dan kewajiban pajak.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi disusun untuk memberikan gambaran atas kinerja entitas dalam satu periode akuntansi, dalam KSP Tirta Sari yaitu dua tahun. Penyajian pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi disajikan sesuai jumlah pendapatan yang diterima pada tahun berjalan dan beban yang

dikeluarkan pada tahun berjalan. KSP Tirta Sari membagi pendapatan menjadi lebih rinci berdasarkan jenis jasa yang diberikan.

Laporan laba rugi disajikan KSP Tirta Sari setiap periode yang menunjukkan penghasilan dan beban koperasi. Pendapatan yang disajikan diklasifikasikan menjadi pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. KSP Tirta Sari mengklasifikasikan beban menurut fungsinya dan kemudian memberikan informasi lebih lanjut mengenai sifat beban melalui subklasifikasi pada masing-masing beban menurut fungsi tersebut.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Pada KSP Tirta Sari adalah tidak semua komponen tersebut tersedia dalam laporan perubahan ekuitas. Pada laporan yang diterbitkan KSP Tirta Sari, pos wajib yang ada hanyalah pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas, saldo awal dan akhir masing-masing ekuitas. Tidak adanya pos wajib lainnya dikarenakan memang tidak dilakukannya distribusi, koreksi, ataupun perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi ekuitas.

4. Laporan Arus Kas

a. Aktivitas Operasi

Penerapannya dalam KSP Tirta Sari, laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi pos-pos yang secara umum terkait aktivitas penghasilan utama KSP Tirta Sari yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam. Produk utama yang ditawarkan bagi para anggotanya berupa simpanan berjangka dan memberikan berbagai jenis pinjaman.

b. Aktivitas Investasi

Arus kas investasi KSP Tirta Sari adalah arus kas yang berkaitan dengan pengeluaran atau penerimaan kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa.

c. Aktivitas Pendanaan

KSP Tirta Sari mendefinisikan bahwa aktivitas pendanaan berasal aktivitas yang menimbulkan perubahan dalam ukuran dan komposisi setoran ekuitas dan pinjaman entitas. Aktivitas pendanaan KSP Tirta Sari tidak terlalu kompleks sehingga laporan arus kas dari aktivitas pendanaan sangatlah sederhana.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Pada paragraf 8.1-8.3 SAK ETAP menyebutkan bahwa catatan atas laporan keuangan (CALK) berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Namun, dalam penerapannya KSP Tirta Sari tidak membuat catatan atas laporan keuangan (CALK) pada laporan keuangannya.

Penjelasan dari masing-masing akun yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan SAK ETAP pada laporan keuangan KSP Tirta Sari dapat dilihat dalam tabel 4.28 berikut ini.

Tabel 4.26
Analisis Kesesuaian Akun-akun Pada Laporan Keuangan KSP Tirta Sari Berdasarkan SAK ETAP

No.	Nama Akun	Jumlah Rekomendasi SAK ETAP	Sesuai SAK ETAP	Belum Sesuai SAK ETAP
1.	Kas	4	3	1
2.	Piutang	4	3	1
3.	Penyisihan penghapusan pinjaman	3	3	0
4.	Beban dibayar di muka	4	3	1
5.	Aset tetap	4	3	1
6.	Akumulasi penyusutan aset tetap	5	4	1
7.	Kewajiban	4	3	1
8.	Simpanan pokok	4	3	1
9.	Simpanan wajib	4	3	1
10.	Modal penyertaan	4	3	1
11.	Cadangan umum dan cadangan risiko	4	3	1
12.	Modal donasi	4	3	1
13.	SHU belum dibagi	4	2	2
14.	Penghasilan	3	3	0
15.	Beban	4	3	1
16.	Neraca	3	3	0
17.	Laporan laba rugi	3	3	0
18.	Laporan perubahan ekuiats	1	1	0
19.	Laporan arus kas	3	3	0
20.	Catatan atas laporan keuangan	3	0	3
Jumlah		72	55	17
Presentase		100%	76%	24%

Jadi jika dilihat dari analisis diatas dapat diketahui bahwa 76% penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan KSP Tirta Sari telah sesuai dengan SAK ETAP sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan SAK ETAP di KSP Tirta Sari telah berjalan dengan baik karena kekurangan 24% yang belum diterapkan hanya pada catatan atas laporan keuangan (CALK).

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan KSP Tirta Sari, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan SAK ETAP di KSP Tirta Sari telah berjalan dengan baik, yaitu sebesar 76% sesuai dengan SAK ETAP. Sedangkan sisanya sebesar 24% yang tidak sesuai dengan SAK ETAP adalah catatan atas laporan keuangannya karena di KSP Tirta Sari belum membuat catatan atas laporan keuangan (CALK).

Pengakuan pos-pos dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan SAK ETAP, namun masih ada beberapa pos yang seharusnya diakui dan tidak diakui oleh koperasi. Koperasi belum mengakui aset tetap secara terpisah di dalam neraca. Koperasi juga belum mengakui akumulasi penyusutan aset tetap secara terpisah atas masing-masing akumulasi penyusutan aset tetap. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan KSP Tirta Sari didasarkan atas biaya historis untuk aset tetap. Kewajiban, penghasilan, dan beban diukur berdasarkan nilai nominal/jumlahnya. Secara keseluruhan koperasi mengukur pos-pos dalam laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. Penyajian laporan keuangan di KSP Tirta Sari juga sudah sesuai dengan SAK ETAP namun masih belum lengkap karena belum dibuatnya catatan atas laporan keuangan (CALK).

Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa di koperasi tersebut belum laporan keuangan lengkap sesuai dengan SAK ETAP, yaitu tidak dibuatnya CALK serta kurangnya SDM yang memadai terkait bidang akuntansi dan koperasi. Adapun saran yang dapat pebeliti berikan adalah sebaiknya KSP Tirta Sari segera membuat catatan atas laporan keuangan untuk periode mendatang. Karena hal ini sesuai dengan SAK ETAP paragraf 3.12 bahwa laporan keuangan lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjabaran lainnya dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan beberapa narasumber/objek penelitian diantaranya KSP Milan, KSP Jamu, KSP Arum, KSP Tiara atau koperasi-koperasi yang lainnya sehingga dapat diketahui penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan koperasi secara lebih menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Andika Hertiyo, Dimas. 2015. Laporan Keuangan Koperasi Serba Usaha Buah Ketakasi Bebas SAK ETAP. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Athira Ulfah, Putri. 2013. Penerapan SAK ETAP Pada Koperasi X. *Laporan Magang*. Depok: Univesritas Indonesia.
- Heriyato, S. 2012. Koperasi Didorong Penuhi Standar Akuntansi. <http://www.depkop.go.id/koperasi-didorong-penuhi-standarakuntansi.html>. [03 Maret 2016].
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 124 hlm.
- Indriantoro dan Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.
- Lexy J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prasetiawan, Yudha. 2015. Rekonstruksi Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Sesuai SAK ETAP. *Skripsi*. Jember : Universitas Jember.
- Rahmat Sahid. 2011. Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman. <http://sangit26.blogspot.co.id/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html> [03 Maret 2016]
- Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi*. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sanusi, A. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sepriana, Ratih. 2015. Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan Koperasi (Studi Kasus KUD Bendosari Kepanjen Kidul Kota Blitar). *Skripsi*. Malang : Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim.
- <http://portal.banyuwangikab.go.id/news/detail/4706/overview-prestasi-dinas-koperasi-dan-umkm-kabupaten-banyuwangi-tahun-2015> [28 April 2016]